

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD Kota Probolinggo berdasarkan hasil analisis pada tahun 1997-2007 paling besar diberikan oleh retribusi daerah dengan rata-rata sebesar 49,18 persen, kemudian pajak daerah dengan rata-rata sebesar 24,65 persen, PAD yang sah lainnya sebesar 20,74 persen dan bagian laba BUMD sebesar 5,42 persen.
2. Laju pertumbuhan PAD Kota Probolinggo selama periode analisis 1997-2007 mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi karena menurunnya kinerja perekonomian di Negara Indonesia yang berimbas di seluruh daerah-daerah di Negara Indonesia termasuk Kota Probolinggo akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Pertumbuhan realisasi penerimaan PAD menurun sampai (-18,36%) dari Rp 3.429.420.000 menjadi Rp 2.799.799.000 pada tahun 1998. Tahun berikutnya kinerja ekonomi berangsur-angsur membaik yang dapat dilihat pada tahun 2001 tumbuh sebesar 34,57 persen sampai pada tahun 2006 sebesar 35,78 persen. Dimana rata-rata pertumbuhan sebesar 14,42 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan tiap sumber PAD Kota Probolinggo sebagai berikut; pajak daerah tumbuh rata-rata sebesar 19,78 persen per tahun, retribusi daerah memiliki pertumbuhan 67,98 persen per tahun, bagian laba BUMD tumbuh 14,84 persen per tahun, dan PAD yang sah lainnya tumbuh sebesar 40,61 persen per tahun.
3. Dengan menganalisis struktur realisasi penerimaan Kota Probolinggo maka diketahui besarnya Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Menunjukkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo terhadap APBD mengalami peningkatan dan penurunan selama periode analisis. Misalnya pada tahun 1997 sebesar 23,03 persen, selanjutnya

menurun pada tahun 2001 menjadi 10,90 persen, dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 18,31 persen.

Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kota Probolinggo jika dilihat dari kemandirian dalam pendanaan pembangunan mungkin masih perlu dipertanyakan. Dilihat dari PAD, dimana rata-rata kontribusi PAD adalah sebesar 12,51 persen per tahun atau kurang dari syarat minimal. Dengan kata lain, Kota Probolinggo hanya mampu mendanai sebesar 12,51 persen saja dari total kebutuhannya. Tingkat ketergantungan fiskal terhadap penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat Kota Probolinggo masih sangat tinggi.

4. Kemampuan Rutin Daerah yang merupakan ukuran tingkat kemandirian atau tingkat otonomi suatu daerah. Dari hasil analisis Indeks Kemampuan Rutin Daerah (IKRD) dapat dilihat bahwa IKRD daerah Kota Probolinggo pada tahun anggaran 1997-2007 kurang dari 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa PAD Kota Probolinggo belum mampu membiayai pengeluaran rutin tiap tahunnya. Rata-rata IKRD Kota Probolinggo per tahun 18,35 persen. Ini artinya PAD Kota Probolinggo belum bisa membiayai pengeluaran secara rutin daerahnya secara mandiri. Salah satu ukuran kemampuan Kota Probolinggo untuk melaksanakan otonomi adalah melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah ini. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi Kota Probolinggo untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi di Kota Probolinggo dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Rendahnya tingkat kemandirian daerah tersebut lebih disebabkan karena sekalipun PAD tiap tahunnya meningkat, tetapi peningkatan PAD yang terjadi masih belum mampu mengimbangi pengeluaran rutin daerah yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.
5. Kinerja administrasi penerimaan PAD Kota Probolinggo dilihat dari efektivitas dan efisiensi alokasi PAD tahun 1997-2007. Dari analisis kinerja administrasi

penerimaan PAD Kota Probolinggo tahun 1997-2007 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas alokasi PAD Kota Probolinggo yang menunjukkan rata-rata sebesar 118,89 persen, berarti bahwa selama tahun 1997-2007 realisasi penerimaan PAD melebihi target penerimaan PAD yang ditentukan. Tingkat Efisiensi Alokasi PAD Kota Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata 87,11 persen, yaitu pada tahun 1997 sebesar 62,17 persen menjadi 109,73 persen pada tahun 2002 dan turun pada tahun 2007 menjadi 72,03 persen yang berarti bahwa biaya pengumpulan PAD lebih kecil dari PAD yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja administrasi penerimaan PAD Kota Probolinggo baik karena realisasi penerimaan PAD lebih besar dari target PAD atau biaya pengumpulan PAD.

6. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kota Probolinggo jika dilihat dari kemandirian dalam pendanaan pembangunan mungkin masih perlu dipertanyakan. Dilihat dari PAD, dimana rata-rata kontribusi PAD adalah sebesar 12,51 persen per tahun atau kurang dari syarat minimal. Dengan kata lain, Kota Probolinggo hanya mampu mendanai sebesar 12,51 persen saja dari total kebutuhannya. Tingkat ketergantungan fiskal terhadap penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat Kota Probolinggo masih sangat tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran-saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

1. Perlu adanya perluasan dan peningkatan upaya pengumpulan PAD melalui perluasan sumber-sumber PAD maupun peningkatan sumber-sumber PAD karena sementara ini upaya pengumpulan PAD di Kota Probolinggo masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada.

2. Mengevaluasi seluruh kinerja BUMD yang ada di Kota Probolinggo yang selama ini kontribusinya masih kecil bagi PAD Kota Probolinggo agar kedepan kinerja BUMD lebih optimal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta perbanyak jumlah penyediaan jasa, khususnya kepada masyarakat di Kota Probolinggo dan masyarakat di luar Kota Probolinggo pada umumnya agar mendorong investasi masuk ke Kota Probolinggo.

